



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

AHLI PEMOHON DIHADIRKAN DALAM UJI UU KPK

Jakarta, 13 Maret 2023 – Sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) segera digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (13/3) pukul 11.00 WIB. Adapun MK mengagendakan Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon pada kesempatan kali ini. Pemohon pada permohonan dengan nomor perkara 112/PUU-XX/2022 ini adalah Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron. Pemohon mempersoalkan norma-norma sebagai berikut.

- **Pasal 29 huruf e UU 19/2019**

Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

e) Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;

- **Pasal 34 huruf e UU 19/2019**

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.

Dalam permohonan, Pemohon menjelaskan bahwa dirinya telah dirugikan secara konstitusional untuk mencalonkan diri sebagai Pimpinan KPK pada masa jabatan selanjutnya. Menurut Pemohon, orang yang telah berpengalaman dalam suatu jabatan harus pula dipandang “telah memenuhi syarat secara hukum” untuk memenuhi jabatan tersebut.

Menanggapi permohonan Pemohon, DPR diwakili oleh Anggota Komisi III Supriansa telah menyampaikan pada sidang Rabu (7/2) bahwa Pasal 29 huruf e UU KPK memang dimaksudkan bagi semua orang tanpa memandang seseorang tersebut pernah menjadi pimpinan KPK atau belum. Menurut DPR, hak Pemohon untuk mengajukan diri kembali sebagai pimpinan KPK masih dijamin sepanjang memenuhi persyaratan pada ketentuan *a quo*.

Melanjutkan persidangan pada Selasa (21/2), telah hadir Kementerian Hukum dan HAM mewakili Pemerintah, dan Pihak Terkait KPK. Mualimin Abdi selaku Plt. Direktur Jenderal HAM menyampaikan bahwa pengaturan usia terendah maupun tertinggi diyakini Pemerintah tidak terkait dengan isu konstitusionalitas. Pemerintah juga memandang bahwa aturan tersebut secara kuat berkaitan dengan pilihan *open legal policy* dengan menyesuaikan kebutuhan hukum masyarakat. Sejalan dengan keterangan Pemerintah, Kepala Biro Hukum KPK Ahmad Burhanuddin juga menyatakan bahwa syarat usia dalam UU KPK merupakan kebijakan hukum terbuka DPR dan Pemerintah sehingga KPK tidak berkewenangan menentukan hal tersebut. (RA/UA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)